



Pengaruh Kompetensi Aparatur Daerah Dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada SKPD Kota Padangsidempuan

Yani Sukriah Siregar

¹ Unimed

ABSTRACT

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kompetensi aparatur daerah berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi dan apakah pemahaman sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi pada SKPD Kota Padangsidempuan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian survei yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur daerah dan pemahaman sistem informasi akuntansi terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. Populasi penelitian ini adalah SKPD Kota Padangsidempuan yang berjumlah 30 SKPD. Pengumpulan data adalah menggunakan kuesioner dan analisis data dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh kedua variabel bebas (kompetensi aparatur daerah dan pemahaman sistem informasi akuntansi) terhadap variabel terikat (penggunaan sistem informasi akuntansi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel bebas (kompetensi aparatur daerah dan pemahaman sistem informasi akuntansi) tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi pada SKPD Kota Padangsidempuan. Hal ini diindikasikan oleh hasil $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($0,368 < 3,354$), dengan tingkat signifikan sebesar 0,695 yang lebih besar dari 0,05. Kesimpulan penelitian ini adalah kedua variabel independen (kompetensi aparatur daerah dan pemahaman sistem informasi akuntansi) tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi pada SKPD Kota Padangsidempuan.

Kata Kunci Keywords

Kompetensi Aparatur, Pemahaman, Informasi Akuntansi, Penggunaan Sistem

PENDAHULUAN

Reformasi memunculkan suatu fenomena baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia yaitu dengan lahirnya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya. Maka dari itu, pemerintah daerah harus mampu menciptakan kehidupan berdemokrasi, tegaknya supremasi hukum, penataan ulang pemerintahan serta reformasi sistem administrasi publik

(Afiyah, 2009). Hal tersebut dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran cerdas melalui suatu inovasi sistem akuntansi. (Bastian, 2007:2)

Saat ini Organisasi sektor publik termasuk pemerintah dihadapkan dengan tekanan untuk menjadi lebih efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Laporan keuangan itu pada akhirnya dapat menjadi suatu informasi untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah daerah. Dalam menjalankan sistem informasi akuntansi ini harus dibarengi dengan teknologi informasi yang memadai serta sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan. Ini sangat terkait dengan kompetensi yang terdiri atas pengetahuan, keahlian, dan pengalaman, serta faktor etika para pelaku sehingga dapat memenuhi tujuan penganggaran dan lebih luasnya formulasi kebijakan fiskal yang berorientasi kepada publik (Afiyah, 2009).

Aparatur daerah berperan menyusun anggaran dan menjalankannya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Dalam menyusun dan menggunakan anggaran ada sistem didalamnya yaitu sistem akuntansi. Sehingga, berjalannya sistem itu diukur dari kompetensi pelaksana dan pemahamannya terhadap sistem itu sendiri serta bagaimana pemerintah menjadikan sistem itu menjadi suatu informasi yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya.

Sistem informasi akuntansi lebih difokuskan pada penggunaan komputer dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan siklus-siklus pemrosesan transaksi, penyediaan informasi keuangan bagi manajemen dalam pengelolaan organisasi. Diterapkannya sistem informasi akuntansi ini oleh pemerintah diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya ketidakakuratan dalam penyediaan informasi keuangan serta mencegah terjadinya keterlambatan dalam memberikan pelayanan serta pelaporan keuangan. Pada akhirnya, sistem informasi akuntansi akan menghasilkan output berupa pelaporan keuangan yang dalam hal ini pelaporan keuangan daerah yang dapat mencerminkan kinerja keuangan daerah. Laporan keuangan merupakan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan.

Dalam menyusun laporan keuangan ada sistem yang diciptakan untuk mengaturnya. Sistem itu sendiri adalah sistem akuntansi. Sistem ini diciptakan agar nantinya terciptalah suatu informasi yang berupa laporan keuangan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan serta kinerja dari suatu daerah. Sistem informasi akuntansi ini juga sangat berperan penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berpernyataan wajar tanpa pengecualian (WTP) yang berarti Pemerintah tersebut telah mampu menyusun laporannya sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam organisasi sektor publik sistem informasi yang didukung teknologi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif, seperti sistem yang terkomputerisasi. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, maka hal ini akan mampu meminimalisasikan ketidakakuratan dalam melakukan

pencatatan ataupun penjurnalan. Tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan juga diharapkan dapat tercapai setelah terciptanya sistem informasi akuntansi tersebut.

Hasil temuan analisis diagnostic Departemen Dalam Negeri (2002), menemukan adanya gejala yang berkaitan dengan profesionalisme aparatur birokrasi, salah satunya adalah sumber daya aparatur pemerintahan daerah belum mempunyai pengalaman memadai dan kurang profesional dan jauh dari memuaskan untuk menangani isu-isu otonomi daerah. (Liestyodono.2008)

Sampai dengan saat ini, penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah itu masih jauh dari memuaskan. Penyebab buruknya kinerja Pemerintah Daerah kemungkinan dikarenakan oleh kompetensi yang masih kurang dalam menjalankan sistem akuntansi pemerintahan daerah atau juga sistem informasi akuntansi yang dijalankan tidak dibarengi dengan perangkat memadai yang mendukungnya. Apabila hal tersebut yang terjadi, maka akan sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerahnya menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Maka dari itu, laporan keuangan yang nantinya akan disusun serta kandungan nilai informasi didalamnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana kompetensi pihak yang terlibat serta pemahaman terhadap keseluruhan sistem itu sendiri dalam menggunakan sistem informasi akuntansi.

Penelitian ini sendiri merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Nunuy Nur Afyiah (2009), penelitian dilaksanakan pada Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan kepala pemerintahan dan anggota DPRD setiap Kabupaten/Kota sebagai sampel. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan sampel yang berbeda dengan replikasinya yaitu dengan menggunakan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran atau Sekretaris/Kepala Tata Usaha selaku PKPA (Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran) pada setiap SKPD pemerintahan kota Padangsidimpuan sebagai sampel serta menambahkan variabel pemahaman sistem informasi akuntansi. Alasan

dilakukan penelitian pada pemerintahan Kota Padangsidimpuan seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya yaitu LKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2010 yang diberikan opini Wajar Dengan Pengencualian (sumber: BPK, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan pada SKPD Kota Padangsidimpuan, untuk melihat apakah kompetensi aparatur daerah dan pemahaman sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. Metode Pengumpulan data primer dari responden dilakukan dengan survei, yaitu dengan cara mengumpulkan data pokok (data primer) dari suatu sampel dengan menggunakan instrumen kuisisioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Operasional penyebaran kuisisioner ini dilakukan dengan cara mendatangi dan membagi kuisisioner secara langsung ke setiap SKPD. Setiap paket kuisisioner terdiri dari dua bagian yang harus dijawab oleh responden dengan mengikuti perintah yang terdapat didalam setiap bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan yang berhubungan dengan data demografi-responden yang meliputi jenis kelamin, pendidikan dan jabatan. Bagian kedua adalah pernyataan yang berhubungan dengan kompetensi aparatur daerah, pemahaman sistem informasi akuntansi, dan penggunaan sistem informasi akuntansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil persamaan regresi linear berganda dapat dilihat bahwa variabel kompetensi aparatur daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penggunaan Sistem informasi Akuntansi pada SKPD Kota Padangsidimpuan. Dengan kata lain hipotesis 1 ditolak karena nilai signifikan yang diperoleh lebih besar dari 0,05 yakni 0,944. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Indriasari (2008) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketidaksignifikanan ini mungkin disebabkan kondisi kapasitas sumber daya manusia di subbagian akuntansi/tata usaha

keuangan yang belum mendukung. Keselarasan juga terjadi pada penelitian Sukmaningrum (2012) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Dalam penelitian Afiah (2009) juga dijelaskan bahwa kompetensi aparatur daerah memiliki pengaruh yang sangat lemah terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. Hal ini disebabkan karena beragamnya latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh aparatur daerah, yang berarti aparatur daerah kurang memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang akuntansi. Dalam penggunaan sistem akuntansi pemerintahan, aparatur daerah dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode atau teknik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada SKPD Kota Padangsidimpuan.

Untuk variabel pemahaman Sistem Informasi Akuntansi diperoleh nilai signifikan 0,401 yang lebih besar 0,05. Artinya hipotesis 2 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa pemahaman Sistem Informasi Akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada SKPD Kota Padangsidimpuan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Tuasikal (2008) yang menyatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman sistem informasi akuntansi aparatur daerah belum memberikan makna yang berarti dalam mendorong penggunaan sistem informasi akuntansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan keadaan seperti ini. Kurangnya pendidikan dan pelatihan mengenai sistem informasi akuntansi merupakan salah satu penyebab rendahnya pemahaman mengenai sistem informasi akuntansi. Kemampuan personal aparatur daerah tentunya juga turut mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi dengan pemahaman yang dimiliki oleh aparatur daerah. Keberadaan infrastruktur teknologi yang baik juga menjadi faktor yang mendorong pelaksanaan penggunaan sistem informasi akuntansi.

Dari hasil pengujian hipotesis Uji F diperoleh nilai signifikan sebesar 0,695 dan nilai F_{hitung} sebesar 0,368. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai F_{hitung} lebih kecil dari nilai F_{tabel} ($0,368 < 3,354$), maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan tidak ada pengaruh kompetensi aparatur daerah dan pemahaman sistem informasi akuntansi terhadap penggunaan Sistem informasi Akuntansi pada SKPD Kota Padangsidempuan. Aparatur daerah berperan menyusun anggaran dan menjalankannya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Dalam menyusun dan menggunakan anggaran ada sistem didalamnya yaitu sistem akuntansi. Sehingga, berjalannya sistem itu diukur dari kompetensi pelaksana dan pemahamannya terhadap sistem itu sendiri serta bagaimana pemerintah menjadikan sistem itu menjadi suatu informasi yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Hasil uji t kompetensi aparatur daerah (KPT) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan Sistem informasi Akuntansi pada SKPD Kota Padangsidempuan. Berdasarkan nilai signifikan dimana ($0,944 > 0,05$), maka keputusannya adalah hipotesis satu (H_1) ditolak.
2. Hasil uji t pemahaman sistem informasi akuntansi (PMS) menunjukkan bahwa pemahaman sistem informasi akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap penggunaan Sistem informasi Akuntansi pada SKPD Kota Padangsidempuan. Berdasarkan nilai signifikan dimana ($0,401 > 0,05$), maka keputusannya adalah hipotesis dua (H_2) ditolak.
3. Hasil uji F menunjukkan bahwa kompetensi aparatur daerah dan pemahaman sistem informasi akuntansi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan Sistem informasi Akuntansi pada SKPD

Kota Padangsidimpuan, nilai ($F_{hitung} < F_{tabel}$), yang berarti menolak hipotesis tiga (H_3).

REFERENCES

- Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Aruan, Nakkok.2003.*Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Studi Deskriptif di Jawa Timur*. Badan Penelitian dan Pengembangan Jawa Timur.
- Astuti, Maulidah Tri.2008.*Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Individu (Penelitian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang)*. Universitas Brawijaya. Malang
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.2011.*Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010*.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Salemba Empat. Jakarta.
- Dengen, Naniel, Heliza Rahmania Hatta. 2009. *Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser*. Jurnal Informatika Mulawarman, Vol. 4, No. 1, Februari 2009.
- Esya,Feбри Purnama. 2008. *Pengaruh Kompetensi Auditor dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Auditor Bea dan Cukai di Wilayah Jakarta*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Fakultas Ekonomi. 2009. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program S1*.Medan
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- <http://id.eprints.undip.ac.id> (diakses 27 Maret 2012).
- <http://id.journal.uui.ac.id> (diakses 23 Maret 2012).
- Indriasari, Desi. 2008. *Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi*

pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Universitas Diponegoro. Semarang

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A tahun 2003 tentang Pedoman penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.

Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta

Liestyodono, Enceng, Purwaningsih. 2008. *Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Good Governance*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol. 2, No.1, Juni 2008.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.

Prabowo, Jerry Agung Dwi. 2011. *Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung

Rohman, Abdul. 2009. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pnegelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda di Jawa Tengah)*. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 9, No. 1. Februari 2009.

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.

Setyowati, Kristina. 2009. *Strategi Pengembangan Sumber Daya Aparatur (PNS) Berbasis Kompetensi*. Jurnal Spirit Publik, Vol. 5, No. 1, April 2009.

Sukmaningrum, Tantriani. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi EMpiris pada Pemerintah Kcamatan dan Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro. Semarang

Tuasikal, Askam. 2008. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah*. Finance and Banking Journal, Vol. 10, No. 1. Juni 2008.